

Salam hangat,

Telah dimuat di harian umum Batak Pos Rabu 5 Maret 2008.

Semoga bermanfaat.

Terima kasih,

Gurgur Manurung

## PENDIDIKAN BERKELANJUTAN DAN HAKEKAT ILMU PENGETAHUAN

Oleh Gurgur Manurung

Dalam kebijakan pembangunan Nasional, bahwa pembangunan berkelanjutan (sustainable development) itu identik dengan pembangunan fisik. Pemerintah maupun para pelaku pembangunan lupa akan pembangunan pendidikan berkelanjutan (sustainable education). Pembangunan berkelanjutan secara fisik dapat diartikan sebagai pembangunan yang limbahnya nol (zero waste) atau minimal menuju titik nol. Pembangunan Pendidikan seringkali disebut bersifat edukatif atau istilah lainya kegiatan yang sifatnya pembelajaran.

Kontroversi Ujian Nasional terus berlanjut. Berbagai komponen masyarakat menolak UN dengan alasan beragam. Beberapa alasan itu adalah bahwa UN hanya melihat kognitif dan mengabaikan afektif dan psikomotor. Umumnya alasan ini disampaikan para akademisi pendidikan. Alasan lain adalah bagaimana mungkin lulus atau tidaknya siswa ditentukan 3 mata pelajaran?, bagaimana dengan siswa yang menyenangi seni?, bagaimana mungkin lulus tidaknya siswa hanya ditentukan beberapa jam?, dimana otonomi guru yang telah mendidik mereka bertahun-tahun?, bagaimana mungkin siswa di pedalaman disamakan standardnya dengan kota?. Berbagai alasan rasional telah disampaikan masyarakat akar rumput maupun akademisi. Akademisi yang lantang itu adalah Prof. HAR Tilaar, Prof. Winarno Surakhmad, Dr. Mohammad Abduhzen, Prof. Suparno dan lain sebagainya. Bertahun-tahun para pecinta pendidikan di negeri ini telah menyuarakan nuraninya melalui media massa maupun melalui jalur-jalur resmi seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan lain sebagainya. Mengapa pemerintah tidak mau mendengar nurani rakyat?.

Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan apakah UN dapat dikategorikan sebagai Pendidikan berkelanjutan?. Apakah UN menjadikan siswa memahami hakekat ilmu yang mereka pelajari?. Apakah UN meningkatkan perbaikan perilaku siswa?. Apakah UN meningkatkan kesadaran siswa untuk mencintai sesama dan lingkungannya?. Apakah UN menjadikan siswa enjoy atau stres untuk memahami ilmu pengetahuan?. Bagaimana dengan siswa yang sikapnya ulet tetapi karena kurang pintar dari aspek pengetahuan menjadi tidak lulus?. Tidakkah orang yang ulet akan potensial untuk menemukan sesuatu yang spektakuler?. Bukankah orang berpengetahuan tinggi tanpa karakter yang baik akan berbahaya bagi masa depan bumi ini?.

Pendidikan di negeri ini memang salah kaprah. Pendidikan dianggap berhasil jika setelah lulus mendapatkan pekerjaan bergensi dengan gaji yang tinggi. Siswa dikondisikan untuk memenuhi target agar pendidikan berikutnya masuk ke sekolah bergensi dengan menghiraukan perkembangan perilaku. Akibatnya, muncul manusia-manusia pengurus Sumber Daya Alam. Dan, muncul pula manusia-manusia koruptif dan kompetitif. Akibatnya, alam menjadi rusak. Hanya karena Anugerh Tuhan saja muncul manusia-manusia yang mengasihi sesama dan manusia yang mencintai kebersamaan dan keadilan sosial. Sekolah tidak mengkondisikan atau menolong siswa untuk

memiliki kesadaran kosmologis. Akibat lain, muncul manusia-manusia yang merusak ekologi.

Untuk mengukur berkelanjutan atau tidak, membutuhkan 3 parameter. Ketiga parameter itu adalah parameter sosial, ekonomi, lingkungan. Pertama, parameter sosial. Pendidikan harus memfasilitasi siswa untuk memiliki jiwa sosial dan sikap adil dalam keseharian. Seluruh proses pembelajaran harus mendorong siswa untuk memahami dan bersikap adil. Faktanya, UN mendorong guru-guru untuk berlaku curang seperti kasus Departemen Pendidikan Kotamadya Medan yang dibuktikan Komunitas Air Mata Guru (KAMG) bahwa UN berjalan curang secara sistemik. UN menjadikan guru salah kaprah dalam pemahaman untuk “menolong” siswa. Apakah adil jika di sekolah tertentu ada soal yang bocor, sementara di sekolah lain pengawasan ketat?. Proses persiapan siswa menghadapi UN tidak menolong siswa untuk kebiasaan bersikap adil. Tetapi UN telah mendorong siswa untuk berjiwa kompetitif. Parameter ekonomi, apakah biaya UN yang sekitar Rp 500 milyar lebih itu optimal untuk menjadikan siswa menjadi manusia terpelajar?. Apakah adil menghabiskan dana sebesar itu di tengah gedung sekolah yang rusak di berbagai daerah?. Bagaimana pula dengan hasil UN yang curang?. Faktanya, hasil UN curang di Medan yang telah diakui Mendiknas Bambang Sudibyo dianggap sah. Dan, dianggap pula prestasi yaitu mengalami tingkat rerata nasional. Celakanya, UN yang terbukti curang menghabiskan uang negara untuk memeriksanya. Bagaimana mungkin hasil UN yang curang tetap diperiksa hasilnya?. Amat ironis. Parameter lingkungan, yaitu siswa terbentuk untuk memiliki kesadaran kosmologis dan ekologis. UN Nasional menurunkan minat siswa untuk melakukan penelitian-penelitian di sekitar mereka. Karena UN mereka terfokus apakah lulus UN atau tidak. Akibatnya, mereka tidak menyadari bahwa setiap saat merupakan proses pembelajaran.

UN menjadikan pendidikan kehilangan nilai, karena kecenderungan mengejar target. UN potensial membunuh kreatifitas siswa untuk mendalami topik yang mereka senangi karena mengejar target kelulusan. Dalam pikiran mereka, kalau tidak di-UN-kan untuk apa dipelajari?. Dengan kata lain siswa tidak memahami hakekat ilmu yang mereka pelajari. Sikap semacam ini telah membunuh inovasi mereka dalam mengeksplorasi topik yang sungguh-sungguh mereka gemari. Kini muncul pertanyaan, di bumi yang semakin panas (global warming) ini paradigma pendidikan macam apa yang tepat?. Masihkah pemerintah tidak mendengar nurani masyarakat yang rasional, objektif dan realistis itu?. Hendaknya pemerintah mengikuti paradigma yang tepat yaitu bagaimana menghasilkan manusia yang memulihkan kondisi bumi. Dan, pendidikan harus memprioritaskan perkembangan perilaku (behavior) tanpa mengabaikan kognitif, psikomotorik dan melihat pendidikan secara holistik.

Penulis adalah anggota Komunitas Air Mata Guru (KAMG), mahasiswa program Doktor Manajemen Lingkungan Universitas Negeri Jakarta.